

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan dua pertiga luas lautan lebih besar dari daratannya. Hal ini bisa terlihat dengan adanya garis pantai hampir setiap pulau di Indonesia. Dengan itu Indonesia merupakan salah satu negara yang sebagian besar wilayahnya berupa wilayah perairan. Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia, ada sekitar 17.000 pulau yang ada. Kondisi ini membawa keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Wilayah pantai hampir selalu menjadi daya tarik tersendiri dan selalu digunakan sebagai kawasan wisata bahari. Selain itu, banyak sumber daya alam yang dihasilkan dari laut. Jika dilihat dari kaca mata ini, Indonesia adalah negara yang sangat kaya, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai (Martono, 2012).

Dalam pandangan ini tidak sepenuhnya benar. Yang mana masyarakat pesisir pantai, sebagian besar masih hidup dibawah garis kemiskinan. Sebagian besar dari mereka memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Kondisi ini turut memperparah kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. Dimana nelayan tradisional adalah nelayan yang memanfaatkan sumber daya perikanan dengan peralatan tangkap tradisional, modal usaha yang kecil, dan organisasi penangkapan yang relatif sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, nelayan tradisional lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri (*subsistence*). Dalam arti hasil alokasi hasil tangkapan yang dijual lebih banyak di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, khususnya pangan, dan bukan di investasikan kembali untuk pengembangan usaha karena terkendalanya faktor-faktor keterbatasan seperti yang di jelaskan sebelumnya.

Berbeda dengan nelayan modern yang bisa dan mampu merespon perubahan, lebih matang dalam menyiasati tekanan perubahan dan kondisi *overfishing*, nelayan tradisional sering kali justru mengalami proses marjinalisasi,

dan menjadi korban dari program pembangunan/modernisasi perikanan yang sifatnya *a-historis*. Akibat keterbatasan teknologi yang dimiliki nelayan tradisional, ruang gerak nelayan tradisional umumnya sangat terbatas, mereka hanya mampu beroperasi diperairan pantai. Kegiatan penangkapan ikan dilakukan dalam satu hari sekali melaut (*one day afishing trip*) (Kusnadi, 2003). Berbeda dengan nelayan modern yang mampu beroperasi di perairan yang lebih jauh dibandingkan nelayan tradisional, Beberapa contoh nelayan yang termasuk tradisional adalah nelayan pancingan, nelayan udang, dan nelayan teri nasi.

Sejak krisis mulai merambah ke berbagai wilayah pertengahan tahun 1997, nelayan tradisional boleh dikata adalah kelompok masyarakat pesisir yang paling menderita, dan merupakan korban pertama dari perubahan situasi sosial-ekonomi yang terkesan tiba-tiba, namun berkepanjangan. Bisa dibayangkan, apa yang dapat dilakukan nelayan tradisional untuk bertahan dan melangsungkan kehidupannya, jika dari hari ke hari potensi ikan di luar makin langka karena cara penangkapan yang berlebihan. Dengan hanya mengandalkan pada perahu tradisional dan alat tangkap ikan yang sederhana, jelas para nelayan tradisional ini tidak akan pernah mampu bersaing dengan nelayan modern yang didukung perangkat yang serba canggih dan kapal besar yang memiliki daya jangkau jauh dan lebih luas. Bagi nelayan tradisional, musim kemarau yang panjang bukan saja sama dengan memperlama masa kesulitan mereka dalam memperoleh hasil tangkapan, tetapi juga menyebabkan kehidupan mereka menjadi makin miskin, dan mereka terpaksa masuk dalam perangkap hutang yang tidak berkesudahan. Keterbatasan kemampuan nelayan-nelayan tradisional dalam berbagai aspek adalah hambatan potensial bagi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengatasi kemiskinan yang membelit mereka selama ini (Kusnadi, 2003).

Selain itu masyarakat pesisir juga selalu hidup dalam ketidak pastian. Kenyamanan mereka tergantung pada kondisi cuaca, iklim atau kondisi permukaan air laut, dikala air laut pasang, tidak jarang banjir menggenangi tempat tinggal mereka serta terkendalanya para nelayan tradisional mengalami kesulitan dalam mencari ikan. Bagi mereka laut adalah sahabat sekaligus sebagai ancaman bagi diri mereka sendiri.

Masyarakat nelayan merupakan masyarakat tradisional dengan kondisi sosial ekonomi yang memprihatinkan. Hal ini telah dibuktikan oleh penelitian sebelumnya bahwa masyarakat nelayan telah benar-benar ketinggalan jika dibandingkan dengan masyarakat luar yang bergerak di bidang lain. Upaya untuk meningkatkan taraf hidup nelayan sangatlah penting mengingat kondisi sosial ekonominya yang memprihatinkan (Mulyadi, 2007). Nelayan sebagai salah satu golongan yang termasuk miskin juga perlu mendapatkan perhatian. mereka merupakan masyarakat yang selalu terkekang oleh kehidupan yang rendah, dimana situasi kerja yang menantang dan dalam melakukan pekerjaan memerlukan fisik yang kuat.

Pemerintah sendiri, sebetulnya bukan tidak memahami penderitaan dan tekanan kemiskinan yang dialami masyarakat desa pesisir, khususnya para nelayan tradisional. Akan tetapi pemerintah sendiri sudah membuat suatu program salah satu program pembangunan yang dirancang khusus untuk membantu upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir adalah Program PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pantai) PEMP diluncurkan pada tahun 2001 yang berakhir tahun 2009. Tujuan dari Program ini adalah meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi dan memperkuat lembaga dan juga partisipasi masyarakat, optimalisasi dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir secara berkelanjutan. dimana program ini di peruntukan kepada para masyarakat pesisir. Seperti dikatakan menteri kelautan dan perikanan RI bahwa sasaran program PEMP adalah nelayan tradisional, nelayan buruh, pedagang, dan pengolah ikan berskala kecil, pembudidaya ikan berskala kecil, dan pengelola sarana penunjang usaha perikanan berskala kecil, yang mana mereka semua adalah termasuk kelompok sosial dalam masyarakat pesisir yang memiliki kerentanan ekonomi (Kusnadi, 2003).

Dalam program PEMP sebetulnya adalah salah satu program unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di desa pesisir secara terencana dan berkelanjutan. Tetapi, yang menjadi masalah di wilayah dan komunitas tertentu seperti desa pantai, berbagai upaya untuk memberdayakan kegiatan ekonomi produktif rakyat miskin atau ekonomi rakyat, sering kali gagal karena kompleksnya permasalahan yang membelenggu komunitas nelayan,

khususnya nelayan tradisional. Bagi nelayan tradisional, persoalan yang dihadapi bukan sekadar makin terbatasnya sumber daya laut yang bisa dieksplorasi, tetapi juga karena keterbatasan mereka sendiri. Yang namanya usaha perikanan yang ditekuni nelayan tradisional, sebagian besar umumnya masih didominasi usaha berskala kecil, teknologi sederhana, sangat dipengaruhi oleh musim, dan hasil-hasil produksinya pun terbatas hanya untuk konsumsi lokal.

Kekurangan program PEMP dalam tataran praktis. Kasus di beberapa daerah mengindikasikan bahwa penyaluran dana PEMP menyalahi aturan, dimana ada beberapa pihak yang bukan nelayan dan masyarakat pesisir memperoleh dana bergulir tersebut. Padahal masih banyak nelayan maupun masyarakat pesisir membutuhkannya. Faktor penyebab diatas hanya merupakan salah satu faktor penyebab ketidak berhasilan PEMP. Ada beberapa hal lain yang menjadikan upaya pemberdayaan nelayan ini belum mampu mencapai target yang diharapkan, yaitu: (1) Beberapa masyarakat pengguna menganggap bahwa dana dari program bersifat gratis. Persepsi ini mempengaruhi tingkat pengembalian kredit. (2) Kurangnya pengetahuan dalam manajemen dan administrasi keuangan (Ramadan, 2009). (3) Keterbatasan kemampuan orang miskin dalam segi keuangan menuntut mereka memberikan pilihan menggunakan dana modal usaha untuk kebutuhan yang mendesak misalnya anak sakit parah dan lain-lain, sehingga perlu disediakan dana penyangga yang *include* dengan dana bantuan program. (4) Banyak sekali program pemberdayaan yang dilaksanakan di suatu daerah yang berasal dari berbagai macam departemen, LSM dan swasta dengan agenda perberdayaannya masing-masing, namun tidak ada upaya untuk melakukan sinkronisasi sehingga program tidak membuahkan hasil yang optimal. (5) Aplikasi program pemberdayaan sering tidak dikerangkai oleh struktur sosial budaya lokal, baik yang berhubungan dengan masalah institusi maupun dengan sistem pembagian kerja yang berlaku dalam masyarakat nelayan setempat karena karakteristik masyarakat dan sumber daya serta permasalahan yang ada di wilayah pesisir sangat *complicated* dan spesifik antar daerah. (6) Program pemberdayaan sering diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif dan fisik semata akan menciptakan eksternalitas negatif di sektor kelautan dan perikanan, seperti kemiskinan lingkungan sumber daya pesisir dan laut (Kusnadi, 2005).

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan seseorang khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka mewakili kekuatan atau kemampuan dalam beberapa hal. Pertama, memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan ataupun bebas dari kesakitan. Kedua, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya serta memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan. Ketiga, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka (Martono, 2012).

Pendayagunaan sumber daya alam laut merupakan tantangan dan kemungkinan sangat besar untuk perkembangan perekonomian suatu daerah di masa yang akan datang. Hal ini antara lain disebabkan pendayagunaan sumber daya alam laut dan wilayah pesisir akan mempunyai peran ganda terlebih pada daerah perkotaan seperti kota Parepare. Di satu pihak akan menghasilkan lapangan kerja dipihak lain akan mendapatkan pendapatan daerah. Pesisir kota Parepare tidaklah seberapa luas dibandingkan berbagai daerah pesisir lainnya. Demikian juga dengan potensi hasil perikannya. Akan tetapi posisi strategis kota Parepare, dengan pelabuhannya sangat mendukung sebagai kota jasa dan niaga. Hal ini mempermudah aksesibilitas, baik bagi aliran orang, barang, uang maupun jasa. Meskipun bahan baku lokal ikan cukup terbatas di Parepare, namun dapat diatasi dengan aliran suplai dari daerah *hinterland* di sekitarnya seperti Barru, Pinrang, Pangkep (kelembagaan dan kemitraan usaha, 2015). Bagaimana strategi masyarakat nelayan pinggiran kota Parepare ini dalam mempertahankan eksistensinya sebagai nelayan.

Gambar I.1 Peta Parepare



Sumber : <http://indonesia-peta.gambar-peta-kota-parepare-sulesel.html>, 2017

Terlepas kurang efektifnya beberapa program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, maka program Pembangunan Masyarakat Pesisir (PMP) atau *Coastal Community Development Project (CCDP)* merupakan program kerjasama antara kementerian kelautan dan perikanan dan *The International Fund for Agricultural Development (IFAD)* hadir sebagai respon terhadap kebijakan dan strategi pemerintah yang mendukung pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan yang berkelanjutan dengan melibatkan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Salah satu program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir adalah proyek pembangunan masyarakat pesisir atau *Coastal Community Development Project (CCDP-IFAD)* merupakan kerjasama kementerian kelautan dan perikanan dengan IFAD sesuai *Financial Agreement* antara Pemerintah Indonesia dengan *President International Fund for Agriculture Development (IFAD)* yang mana Proyek CCDP telah ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2012 yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan (*pro-poor, pro-job, pro-growth and pro-sustainability*) yang sejalan dengan kebijakan proyek IFAD. *International Fund for Agricultural Development*

(IFAD) merupakan salah satu institusi keuangan internasional dibawah PBB yang didirikan pada tahun 1977. Pendirian IFAD merupakan salah satu hasil keputusan penting dari konferensi pangan dunia tahun 1974 untuk merespon krisis pangan di Afrika. Konferensi telah memutuskan bahwa sebuah istitusi keuangan internasional perlu didirikan secepatnya untuk mendanai proyek-proyek pembangunan pertanian dan pesisir khususnya yang berkaitan dengan produksi pangan di negara-negara berkembang (Profil kerjasama IFAD di Indonesia, Kementrian Pertanian : 2016). Dan salah satu yang IFAD berikan bantuan berbentuk pinjaman hutang atau modal yang dipergunakan untuk pembangunan perekonomian masyarakat pedesaan. Program yang di usung IFAD dan kementerian kelautan dan perikanan yaitu *Community Coastal Development– Internasional Fund for Agricultural Development* (CCD-IFAD) hadir untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Program *Community Coastal Development– Internasional Fund for Agricultural Development* (CCD-IFAD) ini sangat penting karena sejalan dengan tema rencana kegiatan pemerintah yaitu kesejahteraan rakyat, dan arah kebijakan yang terkait pembangunan masyarakat pesisir yang meliputi penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan. Kegiatan prioritas adalah pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha dengan indikator jumlah pelaku usaha mikro yang mandiri di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ada empat alasan mengapa proyek ini diajukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan mengapa IFAD harus mempertimbangkan untuk mendanainya, yaitu: (i) masyarakat yang tinggal di pesisir dan pulau kecil pada umumnya termasuk kelompok masyarakat miskin sampai sangat miskin; (ii) banyak masyarakat yang memiliki motivasi dan berkomitmen untuk memperbaiki tingkat ekonomi mereka dan bertanggung jawab dalam pembangunan; (iii) adanya peluang-peluang ekonomi yang baik dengan potensi pasar yang kuat terutama untuk produk kelautan dan perikanan yang bernilai tinggi; dan (iv) secara konsisten mendukung kebijakan dan prioritas pemerintah. Proyek ini juga akan merespon pentingnya mengatasi masalah degradasi sumber daya alam dan perubahan iklim serta memberi pengalaman kepada pemerintah dalam mereplikasi

dan merencanakan kegiatan yang lebih baik lagi (*scaling up*). (CCDP, dkpkotakupang.info, 2015)

Organisasi yang menangani masalah kemiskinan dan pembangunan perekonomian di daerah pedesaan ialah IFAD telah memberikan bantuan ke Indonesia sejak tahun 1980-an dan sasaran yang ditujukan ialah negara-negara berkembang. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengambil judul penelitian : Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan IFAD (*International Fund and Agricultural Development*) melalui program CCDP di Parepare Sulawesi Selatan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan masih kurang efektifnya program kerja pemerintah dalam membangun masyarakat pesisir. Dengan itu pemerintah Indonesia bekerjasama dengan IFAD (*International Fund and Agricultural Development*) melalui program CCDP. Oleh karena itu, masalah yang akan diteliti dalam skripsi adalah “Bagaimana Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan IFAD (*International Fund and Agricultural Development*) melalui program CCDP di Parepare Sulawesi Selatan Periode 2012-2015?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari peneliti adalah :

- a. Untuk mengetahui permasalahan masyarakat pesisir yang ada di Parepare Sulawesi Selatan sebelum dan sesudah adanya program CCDP.
- b. Untuk menganalisis kerjasama pemerintah Indonesia dengan IFAD melalui program CCDP di Parepare Sulawesi Selatan periode 2012-2015

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari peneliti ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi disiplin ilmu hubungan internasional terutama yang berkaitan dengan kerjasama Indonesia dengan IFAD (*International Fund And Agricultural Development*) melalui proyek/program CCDP (*Coastal Community Development Project*) di Parepare Sulawesi Selatan.

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi maupun data dalam studi hubungan internasional



yang memiliki kaitan dengan kerjasama Indonesia dengan IFAD (*International Fund And Agricultural Development*) dalam program CCDP di Parepare Sulawesi Selatan.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan maupun referensi untuk berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan kerjasama internasional yang dilakukan oleh IFAD ke pemerintah Indonesia.

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Terdapat penelitian-penelitian terdahulu mengenai peran *international fund and agricultural development* dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia Timur, dalam tulisan Ega Mentari “**Peran International Fund For Agricultural Development Dalam Pembangunan Perekonomian Masyarakat Indonesia Timur (Studi Kasus : Daerah Papua)**” Vol. 4 No. 1 - Februari 2017, menjelaskan bahwa *International Fund for Agricultural Development (IFAD)*

IFAD di Indonesia sudah sejak tahun 1980. IFAD telah membuat proyek dan bekerja di daerah terpencil yang rentan. Biasanya di negara-negara dengan kondisi kemiskinan tertinggi. Di Papua misalnya, IFAD masuk melalui proyek PNPM Pedesaan Pertanian. IFAD juga berhasil mendukung masyarakat pesisir dengan mampu membantu mereka dari guncangan perubahan iklim dan dengan meningkatkan pendapatan mereka melalui kegiatan nelayan. Perikanan memiliki potensi besar untuk meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Keanggotaan Indonesia dalam IFAD memberikan berbagai manfaat, di antaranya Indonesia dapat memperoleh bantuan program melalui proyek-proyek termasuk pembiayaannya dalam bentuk pinjaman berjangka panjang (40 tahun) dengan bunga rendah; Proyek-proyek IFAD diselaraskan dengan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan ditujukan secara khusus kepada masyarakat miskin di daerah terpencil yang berbasis pertanian; IFAD menyelenggarakan workshop tentang pengumpulan data dan penyebaran informasi mengenai proyek-proyek IFAD guna pelaksanaan proyek-proyek secara lebih baik di masa datang. Indonesia menerima masukan mengenai penanggulangan kemiskinan khususnya di negara-negara berkembang. Adapun bantuan/pinjaman IFAD sampai

dengan tahun 2011 berkisar US\$776,3 juta yang US\$ 387,7 juta di antaranya merupakan “loan” dan terdiri dari 14 proyek. Pada akhir 2011, tersisa 4 (tiga) proyek yang belum diselesaikan di wilayah Maluku dan Maluku Utara, Sulawesi Tengah dan Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Berdasarkan literatur ini, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya IFAD di Indonesia sudah sejak tahun 1980. IFAD telah membuat proyek dan bekerja di daerah terpencil yang rentan. Biasanya di negara-negara dengan kondisi kemiskinan tertinggi. Di Papua misalnya, IFAD masuk melalui proyek PNPM pedesaan pertanian. IFAD juga berhasil mendukung masyarakat pesisir dengan mampu membantu mereka dari guncangan perubahan iklim dan dengan meningkatkan pendapatan mereka melalui kegiatan nelayan. Perikanan memiliki potensi besar untuk meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. IFAD sendiri sudah memberikan bantuan ke Indonesia sejak tahun 1980-an dan sasaran yang ditujukan ialah masyarakat Indonesia Timur seperti Papua, Sulawesi, dan Maluku. Pada bulan Desember 2008, Dewan Eksekutif IFAD telah menyetujui Program Strategis IFAD (COSOP) untuk Indonesia periode 2009-2013. Dalam jurnal tersebut, celah yang penulis temukan adalah bahwasanya jurnal ini memiliki sudut pandang yang hampir sama, jika dalam jurnal ini peran *International Fund For Agricultural Development* dalam pembangunan perekonomian masyarakat Indonesia Timur pada periode 2009-2013, sedangkan peneliti yang akan dilakukan penulis adalah kerjasama pemerintah Indonesia dengan IFAD melalui proyek CCDP di Parepare Sulawesi Selatan periode 2012-2015. Persamaan lainnya dalam hal ini hanya terkait objeknya saja yaitu proyek CCDP. Yang membedakan anatar jurnal Ega Mentari dengan penulis yang dilakukan terletak pada periodisasi. Jika jurnal ini periodenya pada tahun 2009-2013 sedangkan penulis pada tahun 2012-2015 dan subjeknya yang penulis ambil adalah Sulawesi Selatan kota Parepare sedangkan jurnal ega mentari mengambil wilayah Papua.

Dalam jurnal **Rohmiati Amini dan Baiq Yuliana “Analisis Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dalam Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (CCDP –IFAD) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lombok Barat” Vol. 9 No.1 Maret 2015**, menjelaskan bahwa Untuk mengatasi persoalan kemiskinan diperlukan suatu sistem atau strategi yang tepat, efektif dan efisien diwujudkan

dalam berbagai program pemberdayaan yang terpadu dan berkesinambungan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bisa terwujud ketika masyarakat tersebut telah mampu membawa dirinya atau memiliki daya untuk ikut terlibat dalam pembangunan. Program pemberdayaan hendaknya melibatkan masyarakat miskin sehingga aspirasi dan kebutuhan riil mereka dapat diakomodasi. Program pemberdayaan (*empowerment program*) tidak hanya memberikan ikan dan pancing yang tidak dapat menjamin keberlanjutan program (*lack of exit strategy*). Hal pertama yang harus dilakukan dalam melakukan program pemberdayaan adalah meyakinkan mereka bahwa mereka dapat keluar dari jerat kemiskinan sehingga mereka mulai berpikir bahwa kemiskinan adalah titik awal menuju kesejahteraan yang didambakan.

Disimpulkan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam proyek pembangunan masyarakat pesisir (CCDP-IFAD), adalah sebagai berikut: (1) faktor yang mempengaruhi partisipasi adalah jumlah anggota keluarga, (2) faktor yang mempengaruhi partisipasi adalah usia, rumah, pendidikan dan aktivitas sosial, (3) faktor yang mempengaruhi partisipasi adalah pekerjaan sampingan. Koefisien regresi jumlah anggota keluarga bertanda positif sebesar 0,567. Ini bermakna jumlah anggota keluarga bertambah 10% maka akan meningkatkan partisipasi sebesar 5,67%. Semakin banyak jumlah anggota keluarga, maka beban dan tanggung jawab dari kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi semakin besar, maka untuk memenuhi tanggung jawab kebutuhan keluarganya maka masyarakat ikut berpartisipasi dalam proyek pembangunan masyarakat pesisir (CCDP-IFAD) Koefisien regresi usia bertanda positif sebesar 0.054. Ini bermakna apabila usia bertambah 10%, maka partisipasi masyarakat akan naik sebesar 0,54%. Berhubung kegiatan proyek merupakan pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik, maka dengan adanya peningkatan atau bertambahnya umur seseorang akan menambah kekuatannya, sepanjang masih dalam kriteria usia produktif untuk pekerjaan yang mengandalkan kekuatan fisik, yaitu antara 20 - 40 tahun.

Koefisien regresi pendidikan bertanda positif sebesar 0.264. Ini bermakna pendidikan bertambah 10% maka akan meningkatkan partisipasi sebesar 2.64 %. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin banyak peluang

untuk berpartisipasi dalam proyek pembangunan masyarakat pesisir ( CCDP – IFAD ). Hal ini dikarenakan seseorang yang berpendidikan lebih tinggi mempunyai wawasan lebih luas dan lebih dapat memahami berbagai pelaksanaan program pemerintah.

Dan ini salah satu program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir adalah proyek pembangunan masyarakat pesisir atau *Coastal Community Development Project (CCDP-IFAD)* merupakan kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan IFAD sesuai *Financial Agreement* antara Pemerintah Indonesia dengan *President International Fund for Agriculture Development ( IFAD )* yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan ( *pro-poor, pro-job, pro-growth and pro-sustainability* ) yang sejalan dengan kebijakan proyek IFAD.

Berdasarkan Jurnal tersebut, celah yang penulis temukan bahwa jurnal ini memiliki sudut pandang yang hampir sama. Jika dalam jurnal Rohmiati Amini dan Baiq Yuliana mengenai tentang analisis pengaruh partisipasi masyarakat dalam proyek pembangunan masyarakat pesisir (CCDP –IFAD) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah mengenai kerjasama pemerintah Indonesia dengan IFAD melalui Proyek CCDP di Parepare Sulawesi Selatan periode 2012-2015. Persamaan lainnya dalam hal ini hanya terkait objeknya saja yaitu proyek CCDP. yang membedakan antara jurnal Rohmiati Amini dan Baiq Yuliana dengan penelitian yang dilakukan terletak pada aktornya. Jika dalam jurnal Rohmiati Amini dan Baiq Yuliana, aktor dalam proyek IFAD yaitu CCDP yang di laksanakan di daerahLombok, hal ini berbeda dengan aktor yang akan penulis bahas ialah proyek CCDP yang di laksanakan di daerah Parepare Sulawesi Selatan.

Dalam **Skripsi Herawati Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelompok Nelayan Di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar Kasus Kelompok Penerima Bantuan Proyek *Community Coastal Development – Internasional Fund For Agricultural Development (CCD-IFAD)*** Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar 2016,menjelaskan berdasarkan penelitian tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pemberdayaan sosial ekonomi proyek *Community Coastal Development - Internasional Fund for Agricultural Development (CCDIFAD)* di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo Kota Makassar melalui beberapa tahapan kegiatan antara lain yaitu:
  - a. Sosialisasi program, pemahaman anggota kelompok nelayan tentang *proyek Community Coastal Development – InternasionalFund for Agricultural Development (CCD-IFAD)* memiliki tiga program dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar yaitu pemberian bantuan dana, pemberian pelatihan atau semacam penyuluhan ke kelompoknelayan dan perbaikan infrastruktur,
  - b. Pembentukan kelompok kerja. Proses pembentukan kelompok kerja dipilih dari masyarakat yang aktif pada program sebelumnya. Tugas dari kelompok kerja yaitu mengawasi berjalannya proyek.
  - c. Pembentukan kelompok masyarakat pesisir. Tujuan dari pembentukan kelompok nelayan yaitu mengembangkan usaha produktif untuk mendukung peningkatan pendapatan dan penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan.
  - d. Pengembangan kapasitas, yaitu pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pelaksana program untuk memberikan pemahaman tentang cara-cara melaut, membuat laporan keuangan dan eknik pemasaran, dan
  - e. Penyusunan Rencana Kerja Kelompok (RKK). Dalam proses penyusunan Rencana kerja kelompok (RKK) semua anggota kelompok nelayan ikut terlibat dalam penyusunan RKK yang berisi barang dan keperluan sesuai kebutuh masing-masing anggota kelompok nelayan.
2. Manfaat dari program *Community Coastal Development – InternasionalFund for Agricultural Development (CCD IFAD)* dalam memberdayakan kelompok masyarakat pesisir yaitu memberikan beberapa kemandirian berupa kemampuan dalam merencanakan kegiatan untuk meningkatkan produktifitas usaha, kemampuan mentaati perjanjian dengan pihak pelaksana program, kemampuan dalam mengumpulkan modal usaha melalui tabungan kelompok atau iuran bulanan, kemampuan menerapkan teknologi dan pemanfaatan informasi serta kerjasama kelompok yang dapat dilihat dari tingkat produktifitas yang meningkat. Dalam sebuah program terdapat manfaat yang dirasakan oleh penerima bantuan tetapi adapun Kendala yang dihadapi dalam

pelaksanaan program *Community Coastal Development - Internasional Fund for Agricultural Development* (CCD IFAD) yaitu proses pelaksanaannya yang begitu lama.

Berdasarkan Skripsi tersebut, celah yang penulis temukan adalah bahwa skripsi ini memiliki sudut pandang yang hampir sama akan tetapi lebih menekankan dalam pemberdayaan sosial ekonomi kelompok nelayan di Makasar. Jika dalam Skripsi Herawati mengenai tentang pemberdayaan sosial ekonomi Kelompok nelayandi Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar kelompok penerima bantuan proyek *Community Coastal Development– Internasional Fund For Agricultural Development* (CCD-IFAD). Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah mengenai kerjasama pemerintah Indonesia dengan IFAD melalui proyek CCDP di Parepare Sulawesi Selatan periode 2012-2015. Persamaan dalam hal ini hanya terkait objeknya saja yaitu proyek CCDP. yang membedakan antara Skripsi Herawati dengan penelitian yang dilakukan terletak pada aktornya. Jika dalam Sripsi Herawati, objek dalam proyek IFAD yaitu CCDP yang di laksanakan di daerah Makasar, hal ini berbeda dengan objek yang akan penulis bahas ialah proyek CCDP yang di laksanakan di daerah Parepare Sulawesi Swelatan.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

### **1.6.1 Kerjasama Internasional**

Kerjasama internasional merupakan suatu hubungan yang teridentifikasi dari sarana bersama dengan menggunakan metode tertentu untuk dapat mencapai tujuan dari hasil kerjasama tersebut. kerjasama internasional dapat diwujudkan atas dasar memiliki kepentingan yang sama dan bekerja dengan tujuan saling menguntungkan pelaksana kerjasama di dahului dengan tindakan-tindakan yang disalurkan melalui salah satu bentuk interaksi kerjasama internasional melalui hubungan suatu negara dengan negara atau instansi lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kerjasama internasional diperlukan bagi setiap negara agar terjalin hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Proses kerjasama terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional dan global yang muncul dan memerlukan perhatian lebih dari satu negara atau instansi. Masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa solusi

penanggulangan masalah, melakukan diplomasi dan mendiskusikan masalah sehingga berkaitan dengan satu keputusan dengan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. (Holsti, 1993)

Kerjasama adalah sebuah proses yang disebut kolaborasi. Dalam kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak (Holsti, 1983, hal. 209). Kerjasama ini, akan menghasilkan citra suatu organisasi internasional yang akan bekerja keras dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada, ataupun membantu pihak-pihak tertentu.

Kerjasama biasanya bertentangan dengan kompetisi atau konflik. Yang mana dalam kerjasama secara tidak langsung mengindikasikan perilaku sebagaimana mencapai tujuan. Kerjasama dapat dirundingkan dalam sebuah proses tawar-menawar secara eksplisit. Akan tetapi, dalam kerjasama pihak yang lebih kuat bisa memaksa pihak lainnya untuk merubah kebijakannya. Meskipun kerjasama tidak selalu menguntungkan ketergantungan pada permasalahan dan situasi. Akan tetapi usaha-usaha yang dilakukan oleh negara untuk mengurangi dampak kebijakan satu sama lain akan meningkatkan keuntungan bersama (Milner, 1992, hlm. 468-495)

Menurut K.J Holsti kerjasama internasional di definisikan sebagai bentuk hubungan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dari satu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya. Kerjasama internasional dapat dilakukan dalam segala aspek kehidupan antara lain dengan bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Dengan adanya ketergantungan ini, maka akan menimbulkan suatu hubungan timbal balik yang diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi dua belah pihak yang melakukan kerjasama maupun masyarakat internasional pada umumnya. Kerjasama internasional merupakan alat bagi aktor-aktor yang berfungsi memberikan fasilitas dan pelayanan serta pemenuhan kebutuhan. Tujuan kerjasama internasional yang dilakukan oleh suatu negara adalah mencapai usaha yang lebih baik atau lebih besar dibandingkan jika suatu negara mengupayakannya sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Kerjasama internasional

yang dilakukan oleh suatu negara juga mempunyai beberapa manfaat, diantaranya:

1. Kerjasama dapat mendorong berbagai upaya suatu negara agar dapat bekerja lebih efektif dan efisien dengan dilakukannya secara bersama dan mempunyai tujuan serta prinsip yang sama.
2. Kerjasama dapat mewujudkan terciptanya suatu hubungan antar negara yang terkait dalam melakukan kerjasama menjadi harmonis, serta dapat meningkatkan rasa kesetiakawanan yang baik.
3. Kerjasama dapat meningkatkan rasa memiliki situasi dan keadaan yang baik terjadi di wilayah lingkungannya. Sehingga secara otomatis kedua negara yang menjalin kerjasama tersebut akan ikut menjaga dan melestarikan situasi dan kondisi yang baik, agar terhindar dari permasalahan yang mengganggu keamanan kedua negara.
4. Kerjasama dalam manfaat ekonomi, dapat menunjang suatu upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi suatu negara.
5. Kerjasama yang dilakukan bertujuan dan mempunyai suatu prinsip yang terarah untuk perdamaian keamanan internasional, dapat menunjang suatu upaya pemeliharaan dan pemulihan situasi dan kondisi keamanan suatu negara menjadi lebih terjaga dan lebih terjamin aman.

Kerjasama dapat terjadi dalam konteks yang berbeda-beda. Kebanyakan, interaksi kerjasama ini terjadi secara langsung diantara dua negara atau negara dengan organisasi internasional yang menghadapi masalah yang sama atau memiliki kepentingan yang sama. Masalah-masalah yang ditangani melalui kerjasama antara negara antar lain, mengenai perdamaian, keamanan, perdagangan dan pembangunan.

Ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara melakukan kerjasama dengan negara atau instansi lainnya:

1. Dengan alasan demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya banyak negara yang melakukan kerjasama dengan negara lainnya untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam



memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara atau instansi tersebut.

2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.
4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain (holsti, 1995:362-363)

Kerjasama internasional dapat dilaksanakan dengan baik, jika kerjasama internasional dapat saling merasakan hasil dari kesepakatan operasional kerjasama internasional tersebut. Suatu negara mengadakan kerjasama internasional karena setiap bangsa atau negara tidak dapat memenuhi kebutuhan akan segala jasa atau barang yang dibutuhkan. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap negara berbeda-beda satu dengan yang lainnya karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya diantaranya keadaan alam atau keadaan geografis, tingkat perekonomian penduduk serta tingkat pendidikan dan teknologi yang diterapkan hubungan kerjasama yang baik antar dua negara atau lebih. Agar kerjasama tersebut dapat berhasil dan dapat saling menguntungkan, maka kerjasama antar negara diatur dalam suatu bentuk kerjasama beserta organisasi internasionalnya masing-masing.

Dalam penelitian ini. Keterkaitan teori kerjasama internasional dengan permasalahan penelitian yaitu keterkaitan dalam kerjasama internasional antara Indonesia dengan IFAD khususnya mengenai permasalahan pembangunan ekonomi atau pengentasan kemiskinan di Indonesia salah satunya wilayahnya Parepare Sulawesi Selatan. Dan kerjasama yang ditawarkan yaitu dengan membuat program CCDP. Sehingga teori ini digunakan untuk menganalisis interaksi antar Indonesia dengan IFAD dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi di Parepare Sulawesi Selatan.

### **1.6.2 Bantuan Luar Negeri**

Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen kebijakan yang sering digunakan dalam hubungan luar negeri. Bantuan luar negeri diidentifikasi sebagai transfer sumber daya dari satu pemerintah ke pemerintah lain. Teknik

pemberian bantuan luar negeri dapat dilakukan secara bilateral maupun multilateral atau dengan kata lain dapat dilakukan secara *government to government* (g to g) ataupun melalui lembaga keuangan internasional seperti IMF. Tujuan pemberian bantuan luar negeri diantaranya, yaitu untuk mendukung persekutuan, membangun ekonomi, memperoleh bahan baku strategi, ataupun menyelamatkan kehidupan bangsa dari keruntuhan ekonomi maupun bencana alam (Perwira dan Yani, 2005, hlm. 83-84)

Bantuan luar negeri dipercaya sebagai cara yang paling sukses untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan. Alasan pemberian adalah lemahnya performa birokrasi penerima bantuan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi dalam pemberian bantuan yaitu hubungan kolonial dimasa lalu dan juga pola dukungan dalam organisasi internasional, seperti *United Nation*. Institusi politik dan kebijakan ekonomi negara penerima (Alesian & Dollar, 2000, Hlm. 22)

Menurut K.J Holsti, bantuan luar negeri merupakan transfer uang, teknologi, ataupun nasihat-nasihat dari negara pendonor ke negara penerima bantuan asing atau bantuan luar negeri merupakan pemindahan dana, barang atau nasihat teknis dari satu negara donor kepada negara penerima yang merupakan suatu saran kebijakan yang telah digunakan dalam hubungan luar negeri selama berabad-abad. Jadi, bantuan luar negeri merupakan transfer sumber daya dari suatu pemerintah ke pemerintah lain yang dapat berbentuk dana, barang, maupun nasihat teknis. Menurut K.J Holsti, tipe bantuan luar negeri ada empat diantaranya: bantuan teknis, hibah, peminjaman pembangunan dan bantuan kemanusiaan yang bersifat darurat. Bantuan luar negeri yang diberikan negara pendonor ke negara penerima salah satunya dapat berbentuk hibah. Ada beberapa indikator dalam pemberian dana hibah, indikator tersebut dikelompokkan menjadi:

1. Hibah menurut skema dan bentuknya

- Hibah dalam bentuk cash: hibah ini sangat terbatas dan diberikan kepada negara-negara yang sangat miskin. Cara penarikan dana hibah tersebut dengan menunjukkan bukti impor atas komoditas yang sesuai dengan kesepakatan dengan pemberian hibah.

- Hibah dalam bentuk barang dan jasa dalam rangka bantuan proyek atau kerjasama keuangan. Hibah dalam bentuk barang dan jasa yang berdiri sendiri skema ini dapat dikatakan sama dengan pinjaman luar negeri untuk proyek-proyek pembangunan (pengadaan barang dan jasa). Yang membedakan adalah sumber dana dalam skema ini tidak perlu dikembalikan. Hibah dalam bentuk barang dan jasa untuk mendukung atau sebagai bagian *project assistance* yang dibiayai pinjam hibah seperti ini berupa dana dan diberikan bersama-sama dengan pinjaman untuk pembiayaan suatu proyek pengadaan barang dan jasa.
- Hibah dalam rangka bantuan teknik (*technical assistance*) atau kerjasama teknik (*technical cooperation*) hibah untuk mendukung proyek-proyek yang di biyai pinjaman hibah ini berupa studi persiapan, appraisal ataupun *monitoring* proyek-proyek pengadaan barang dan jasa yang dibiayai pinjaman. Dalam hal ini pihak pemberian dana menyediakan tenaga ahli dan membiayakan seluruh kegiatan yang dilakukan tenaga ahli tersebut. pihak penerima hibah hanya memfasilitasi kegiatan tenaga-tenaga ahli tersebut dan menerima hasil *appraisal* dan *monitoring*. Hibah dalam rangka *technical assistance* yang berdiri sendiri. Hibah dalam skema ini berupa penyediaan tenaga ahli dan atau konsultan untuk melakukan suatu proyek atau kegiatan tertentu. Lingkup pekerjaan konsultan berbeda-beda bergantung pada jenis proyek atau kegiatan dan kontrak yang mengikatnya. Hibah bentuk inilah yang lazim diberikan oleh semua negara pendonor dan lembaga donor. Dalam skema ini memungkinkan adanya pengadaan barang. Namun sifatnya hanya pendukung pekerjaan tenaga ahli. Semua pemberdayaan tenaga ahli dilakukan semuanya oleh pihak pendonor. Penerima hibah hanya menyediakan hal-hal umum seperti ruang kantor. Personalis pendamping, kendaraan agar tenaga ahli tersebut dapat bekerja dengan baik.

- Beasiswa dan pendidikan: bentuk hibah untuk yang juga lazim diberikan adalah beasiswa untuk studi bergelar maupun non-gelar didalam maupun diluar negeri, pelatihan ataupun magang dinegara donor, serta pertukaran pemuda. Masalah administrasi keuangan dikelola langsung oleh negara atau lembaga pemberi hibah.
- Hibah dalam rangka bantuan kemanusiaan: hibah ini sifatnya lebih merupakan bantuan darurat. Hibah yang diberikan berupa bahan esensial yang sangat diperlukan seperti pangan, obat-obatan atau selimut serta ada kalanya uang tunai.

## 2. Hibah menurut penurunannya dan penyalurannya

- Hibah untuk pemerintah (*government to government*) hibah jenis ini adalah hibah dalam berbagai skema diatas yang diperuntukan bagi proyek-proyek pemerintah tau kegiatan-kegiatan dalam rangka program atau proyek pemerintah dan umumnya dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah atau lembaga bentukan (semi) pemerintah
- Hibah untuk non pemerintah atau (*government to privat*) hibah ini diberikan dan disalurkan langsung oleh pemerintah atau lembaga donor kepada lembaga-lembaga non pemerintah. Peroalan yang sering menucul dalam kaitan ini adalah dimasukannya alokasi hibah dalam lembaga-lembaga non pemrintah (lembaga swadaya masyarakat) sebagai bagia dari bantuan pembangunan resmi negara donor atau *official development assistance* (ODA) kepada Indonesia yang berarti juga dimasukan sebagai bagian dari *pladge* CGI. Sementara pengelola hibah ini ditangani langsung oleh donor dan pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada lembaga atau organisasi penerima. Kesulitan yang dihadapi adalah bilamana pemerintah dituntut (khususnya oleh anggota dewan perwakilan rakyat) untuk memberikan informasi yang rinci mengenai arah pembangunan hibah/*pladge* yang telah diterima. Terdapat anggapan bahwa seluruh ODA yang diberikan adalah untuk pembiyaan program-program pemerintah yang tercatat dalam APBN. Padahal dalam kenyataannya tidaklah demikian, hibah tersebut bahkan tidak

“mampir” kedalam kas pemerintah. Lebih dari itu acapkali pihak donor nampak kurang terbuka dalam memberikan informasi mengenai organisasi yang mendapat hibah, jumlah hibah yang diberikan dan peruntukannya. (K.J. Holsti dan M. Tahir Azhary: 1988)

Sifat urgensi di atas tidak terlepas juga dari motivasi para pemberi bantuan luar negeri (negara donor). Terhadap empat kategori motivasi negara donor, yaitu:

1. Motif kemanusiaan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di negara dunia ketiga melalui dukungan kerjasama ekonomi.
2. Motif politik yang memutuskan tujuan untuk meningkatkan *image* negara donor. Peraihan pujian menjadi tujuan pemberi bantuan luar negeri baik dari politik domestik dan hubungan luar negeri donor.
3. Motif keamanan nasional, yang mendasarkan pada asumsi bahwa bantuan luar negeri dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang akan mendonor stabilitas politik dan akan memberikan keuntungan pada kepentingan negara donor. Dengan kata lain, motif keamanan memiliki sisi ekonomi.
4. Motif yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara donor.

Dari keempat motivasi di atas terlihat bahwa pada hakikatnya bantuan luar negeri merupakan bantuan yang diberikan kepada suatu negara oleh pemerintah negara lainnya atau lembaga internasional berupa bantuan ekonomi, sosial dan militer yang diberikan secara bilateral atau multilateral oleh badan internasional. Tujuan pemberian bantuan luar negeri antara lain mendukung persekutuan, membangun ekonomi, meraih dukungan ideologis memperoleh bahan baku, strategi, keamanan serta menyelamatkan kehidupan bangsa dari bahaya keruntuhan ekonomi ataupun bencana alam. (perwita, 2005, 84) Dalam pandangan kaum pluralis permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh suatu negara tidak hanya dapat diselesaikan oleh actor negara saja, tetapi aktor non-negara pun bisa berperan dalam mengatasi permasalahan dalam suatu negara tersebut. dalam kasus ini IFAD sebagai salah satu organisasi internasional yang mempunyai tujuan mengetas kemiskinan di negara berkembang dengan maksud untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan/pesisir di negara-negara berkembang, sehingga teori *Foreign Aid* ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana bantuan IFAD dalam

meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir di wilayah Indonesia Timur melalui program-program yang dirancangnya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan/pesisir.

Jadi jelas bahwa *Foreign Aid* sebenarnya didirikan bukan hanya untuk sekedar mencapai suatu tujuan pada masing-masing pihak saja, tetapi selain pada itu para anggotanya bekerjasama untuk mencapai tujuan dan mencapai suatu kepentingan bersama, sehingga negara-negara atau organisasi yang membentuk *Foreign Aid* merasakan bahwa tujuan nasional mereka dapat tercapai. IFAD juga bertujuan dalam setiap program-programnya agar pada tahun 2015 masyarakat pedesaan di negara-negara berkembang dapat bebas dari kemiskinan.

### **1.6.3 Konsep Coastal Community Development Project (CCDP)**

melalui program *Coastal Community Development Project* (CCDP) pihak – *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) sepakat memberikan bantuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir di wilayah Indonesia Timur. Yang mana CCDP merupakan kerjasama kementerian kelautan dan perikanan dengan IFAD sesuai *Financial Agreement* antara pemerintah Indonesia dengan *President International Fund for Agriculture Development* (IFAD) yang mana Proyek CCDP telah ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2012 yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan (*pro-poor, pro-job, pro-growth and pro-sustainability*) yang sejalan dengan kebijakan proyek IFAD (Profil kerjasama IFAD di Indonesia, Kementerian Pertanian : 2016).

Dalam hal ini salah satu fokus adanya program CCDP bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM, Teknologi yang terkait dengan alat-alat nelayan selain itu memfokuskan peningkatan ekonomi yang ada di wilayah Indonesia Timur dengan adanya bantuan dari *International Fund for Agricultural Development* (IFAD).

## 1.7 Alur Pemikiran



Gambar 1.2 Alur Pemikiran Penelitian

## 1.8 Asumsi

1. Bahwa aktor internasional dapat berperan dalam pembangunan seperti IFAD dapat berperan dalam pembangunan internasional.
2. Dengan itu pemerintah Indonesia berkerjasama dengan IFAD untuk mendorong masyarakat pesisir di Parepare Sulawesi Selatan.

## 1.9 Metode Penelitian

### 1.9.1 Pendekatan Penelitian

Dilihat melalui jenis datanya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu mekanisme dan proses dalam suatu penelitian dimana peneliti berfikir secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta serta fenomena sosial yang ada di masyarakat melalui pengamatan yang dilakukan di lapangan, kemudian melakukan sebuah analisa dan melakukan teorisasi sesuai dengan apa yang telah diamati. Penelitian yang dilakukan penulis menganalisa tentang bagaimana kerjasama pemerintah Indonesia dengan IFAD (*International Fund and Agriculture Development*) melalui program CCDP (*Coastal Community Development Programme*) di Parepare Sulawesi Selatan.

### **1.9.2 Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif dengan menggambarkan permasalahan yang ada dengan didasarkan pada fakta-fakta yang tersedia, dimana dalam metode deskriptif dirancang untuk mengumpulkan tentang keadaan-keadaan nyata sekarang (sevilla dkk, 1993, hal.3) kemudian menghubungkan fakta yang satu dengan yang lainnya. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek tertentu, suatu kondisi, system pemikiran, ataupun suatu peristiwa yang terjadi pada saat ini. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran faktual serta akurat mengenai fakta-fakta yang ada, sifat-sifat hubungan antar fenomena yang sedang diteliti.

### **1.9.3 Jenis Data**

Jenis data yang penulis gunakan pada penelitian yang penulis lakukan ini adalah jenis data primer dan sekunder. Pertama, data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai objek penulisan. Terkait dengan penelitian ini penulis melakukan metode wawancara mendalam dipergunakan untuk memperoleh data dengan metode wawancara dengan narasumber yang akan diwawancarai

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada penelitian, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Penelitian melakukan kajian pengembangan teori untuk menentukan, menyiapkan, mengumpulkan, menganalisis data dan menyimpulkan (Sugiyono, 2014). Pada kasus tunggal, hasil penelitian digunakan untuk mengecek kembali kepada teori yang telah dibangun pada tahap pertama penelitian.

### **1.9.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan informasi, data primer didapat melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan topik bahasan. Wawancara mendalam, wawancara macam ini dilakukan dengan informasi kunci dan subjek penelitian yang pada umumnya. Informasi kunci adalah orang-orang yang karena



pengetahuannya luas dan mendalam tentang komunitasnya dapat memberikan data yang berharga. Satu teknik yang juga amat berguna adalah pengumpulan riwayat hidup (suryanto bagong, 2005:189) Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. wawancara dengan pihak dari Organisasi IFAD (*The International Fund for Agricultural Development*), dengan Ibu Annisa dan Heike hakim sebagai country programme assistant melalui wawancara di kantor IFAD, email [h.hakim@ifad.org](mailto:h.hakim@ifad.org) pada tanggal 27 Desember 2017.
2. Wawancara Biro Humas dan Kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan RI bagian Kerjasama Multilateral, dengan Anindita Laksmiwati sebagai staf bagian multilateral melalui wawancara di kantor kementerian kelautan dan perikanan pada tanggal 27 November 2017.
3. Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian RI bagian Kerjasama Multilateral, Biro Kerjasama Luar Negeri IFAD dengan Arif Rachman kepala sub bagian Multilateral di kantro kementerian kelautan dan perikanan pada tanggal 1 agustus 2017.
4. Studi kepustakaan (*library research*)

Penulis menggunakannya untuk mendapatkan data-data primer serta sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi terhadap dokumen di tingkat nasional ataupun internasional. Sedangkan data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui proses membaca, memahami, membandingkan, serta menganalisa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan media internet serta data-data yang lainnya terkait dengan penelitian ini.

### **1.9.5 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif, pada tahap analisis data dan metode yang digunakan untuk menyajikan data, menafsirkan data, memvalidasi data dan menunjukkan hasil potensi dari penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan hasil temuan. Sementara untuk wawancara penelitian menganalisis sebuah wawancara yang dikumpulkan sebelumnya, kemudian dibuat sebagai naratif dalam laporan akhir dan mengatur struktur laporan akhir (creswell, john W, 2014:184-185)

Penelitian kualitatif lebih mementingkan ketepatan serta kecukupan data. Penekanan data penelitian kualitatif adalah Validitas datanya, yaitu kesesuaian antara apa yang dicatat sebagai data dan apa yang sebenarnya terjadi pada latar yang diteliti berdasarkan data wawancara, table dan sumber yang lainnya, lalu menjelaskan fenomena yang ada dibalik permasalahan tersebut. Pada hal ini, data yang didapatkan dihubungkan sehingga kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Pada kasus ini, penulis menemukan masalah mengenai kondisi pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir di parepare yang mengalami ketidak seimbangan terhadap pendapatan dengan kebutuhan penduduk serta tidak efektifnya program pemerintah, yang kemudian penulis akan menganalisa kerjasama pemerintah Indonesia dengan IFAD melalui CCDP di Parepare sulawesi selatan.

## **1.10 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisikan pendahuluan, latar belakang penulisan masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teori, tinjauan kepustakaan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : PERMASALAHAN MASYARAKAT PESISIR DI PAREPARE SULAWESI SELATAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang keadaan masyarakat parepare, selanjutnya permasalahan serta hambatan masyarakat pesisir di Parepare Sulawesi Selatan dan bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi masyarakat pesisir.

### **BAB III : KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN *INTERNATIONAL FUND AND AGRICULTURE DEVELOPMENT (IFAD)* MELALUI PROGRAM CCDP DI PAREPARE SULAWESI SELATANPERIODE 2012-2015**

Dalam bab ini berisikan mengenai bagaimana kerjasama pemerintah Indonesia dengan IFAD, serta analisis kerjasama pemerintah Indonesia melalui program CCDP dalam membantu masyarakat pesisir di Parepare Sulawesi Selatanperiode 2012-2015,

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab terakhir disini berisikan hasil kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah penulis lakukan, serta terdapat kritik dan saran.

